



Kejari Sita Enam Karung Berkas

Babak Baru Dugaan Korupsi Terminal Manuver Gilimanuk

NEGARA, TRIBUN BALI

- Babak baru kasus dugaan korupsi Terminal Manuver Gilimanuk telah dimulai. Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana mengeledah Kantor Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Pemkab Jembrana, Selasa (20/6) kemarin.

Kejari menasar ruangan Bidang Perhubungan pada Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Pemkab Jembrana setelah menyodorkan surat penggeledahan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Pemkab Jembrana, I Made Dwi Maharimbawa.

Penggeladahan dipimpin Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Jembrana, Made Pasek Budiawan, dan Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Jembrana, Putu Eka Sabana Putra. Selama tiga jam berlangsung, petugas menyita 28 berkas yang berkaitan dengan pengelolaan Terminal Parkir Manuver Gilimanuk.

Pada waktu yang bersamaan, penggeladahan juga berlangsung di kantor Terminal Parkir Manuver Gilimanuk, Kelurahan Gilimanuk yang dipimpin oleh Kasi Intel Kejari Jembrana, Ario Dewanto. Hasilnya, petugas menyita enam karung berkas yang berkaitan dengan pengelolaan Terminal Parkir Manuver Gilimanuk yang didominasi oleh karcis-karcis terminal tersebut.

Kasi Pidsus Kejari Jembrana, I Made Pasek Budiawan mengungkapkan, kasus

Kami memang belum menetapkan tersangka karena masih mengumpulkan berkas alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi.

Made Pasek

Budiawan

Kasi Pidana Khusus (Pidsus)
Kejari Jembrana

ini telah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Meski begitu, ia mengaku belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi Terminal Manuver yang terletak di Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya ini.

Penggeladahan kata dia, bertujuan untuk mengumpulkan barang bukti yang memperkuat adanya dugaan korupsi di Terminal manuver yang berada di Selatan Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk tersebut. Selain mengumpulkan berkas, Kejari juga melangsungkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait pengelolaan retribusi Terminal Manuver Gilimanuk.

"Kami memang belum me-

netapkan tersangka karena masih mengumpulkan berkas alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi," ungkap Made Pasek.

Untuk diketahui, kasus ini bergulir karena muncul selisih laporan antara retribusi yang masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah kabupaten (Pemkab) Jembrana dengan jumlah kendaraan yang keluar Bali melalui Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk.

Sebab, sebelum memasuki Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, kendaraan roda dua, roda empat maupun kendaraan angkutan penumpang dan angkutan barang wajib menuju Terminal Manuver Gilimanuk. Kendaraan tersebut membayar retribusi dengan jumlah besaran yang bervariasi.

Pengelolaan terminal ini sebelumnya berada di bawah wewenang Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Jembrana. Karena tak kunjung mencapai target yang ditetapkan Pemkab Jembrana, tahun 2015 hingga 2016 pengelolaannya dilimpahkan ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Hubkominfo) Jembrana.

Saat itu, Dishubkominfo dipimpin oleh, I Gusti Ngurah Bagus Putra Riyadi. Tahun ini, Dishubkominfo berubah nama menjadi Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan sesuai aturan Organisasi perangkat Daerah (OPD) baru. (jas)

Edisi : Rabu, 21 Juni 2017

Hal : 4